

LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2017



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



VISI

*Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima Serta Didukung Oleh Peran Aktif Masyarakat*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan

1.1.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Pendapatan
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

1.1.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan
2. kepada Bupati
3. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan
4. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Pendapatan

1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

Badan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan keuangan bidang Pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendapatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 41 Tahun 2016, Struktur Organisasi Badan Pendapatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dengan 2 (dua) sub bagian dan 3 (tiga) Bidang, masing-masing bidang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang - bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 1. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pendataan
 - b) Sub Bidang Penetapan
 - c) Sub Bidang Pelayanan Pajak
 2. Bidang Penagihan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Penagihan Wilayah I
 - b) Sub Bidang Penagihan Wilayah II
 - c) Sub Bidang Penagihan Wilayah III
 3. Bidang Monitoring dan Pelaporan, membawahi :
 - a) Sub Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan
 - b) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - c) Sub Bidang Teknologi dan Informasi Pendapatan Daerah

1.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah diawali dengan pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Pendapatan dalam hal ini Badan Pendapatan yang membantu Kepala Daerah dalam membantu Bupati dalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pendapatan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Potensi dan lokasi yang sangat strategis namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi;
2. Masih belum banyaknya produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, seperti peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah, PBB-P2, BPHTB, yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja;
3. Kualitas dan Kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ketatalaksanaan yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah, PBB-P2 dan BPHTB, karena institusi Badan Pendapatan baru terbentuk pada tahun 2016, yang didalamnya banyak pegawai dari luar yang baru masuk, sehingga belum terlalu menguasai permasalahan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM ini juga disebabkan

terbitnya berbagai regulasi baru tentang pendapatan daerah sehingga persepsi yang belum merata dari setiap pegawai Badan Pendapatan tentang regulasi tersebut;

4. Belum terbentuknya budaya kerja dari seluruh pegawai Badan Pendapatan, karena Visi, Misi, Nilai-nilai, strategi dan kebijakan dari Badan Pendapatan baru disusun dalam Renstra pada tahun 2016 dan sekarang diperbaharui pada Renstra 2016-2021, sehingga belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai Badan Pendapatan;
5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota penjualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah.

1.4 Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Badan Pendapatan sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pendapatan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi pendapatan daerah, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pelaksanaan pendapatan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam pelaporan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;
2. Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi pajak daerah yang ada;
3. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal-usul penugasan, dan *ethos* kerja individual; dan
4. Belum tersosialisasinya dengan baik tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran-kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Pendapatan mengampu urusan pendapatan daerah. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, Badan Pendapatan mendukung pencapaian 1 (satu) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum pada RPJMD yaitu :

Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja sasaran Badan Pendapatan sebanyak 3 (tiga) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula	Sumber Data	OPD Penanggungjawab
1	Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	$\left\{ \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100 \right\}$	Renstra, Renja	Badan Pendapatan
2	Terwujudnya Pembinaan, Penertiban Pajak, dan Retribusi melalui Penggalan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Optimalisasi Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	$\left\{ \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak}}{\text{Sumber - sumber PAD}} \times 100 \right\}$	Renstra, Renja	Badan Pendapatan
3	Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Monitoring, Pelaporan dan Rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait	Persentase koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Kerjasama efektif dengan Instansi Terkait	$\left\{ \frac{\text{Wajib Pajak}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \right\}$	Renstra, Renja	Badan Pendapatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2017 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2017 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 3 indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (cascading) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	10 %
2	Terwujudnya Pembinaan, Penertiban Pajak, dan Retribusi melalui Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Optimalisasi Penggalan Potensi dan Sumber-sumber Pendapatan	10%
3	Terwujudnya Peningkatan Pengendalian Monitoring, Pelaporan, dan Rekonsiliasi dengan instansi terkait.	Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui kerjasama Efektif dengan Instansi Terkait.	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *outputs*, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2017, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$	: Sangat Berhasil
$70 < X < 85$	: Berhasil
$55 < X < 70$	: Cukup Berhasil
$X < 55$	: Tidak Berhasil

Target pencapaian kinerja Badan Pendapatan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pencapaian Target Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	10 %
2	Terwujudnya Pembinaan, Penertiban Pajak, dan Retribusi melalui Penggalan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Persentase Optimalisasi Penggalan Potensi dan Sumber-sumber Pendapatan	10%
3	Terwujudnya Peningkatan Peningkatan Penggalan Monitoring, Pelaporan, dan Rekonsiliasi dengan instansi terkait.	Persentase Optimalisasi Koordinasi Penerimaan PAD melalui kerjasama Efektif dengan Instansi Terkait.	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	622.065.038,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	733.763.855,-
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	49.650.000,-
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	28.467.278,-
4	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.898.791.448,-
Total Anggaran		3.332.737.619,-

Painan, 27 Februari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

(H. HENDRAJONI, S.II., M.H.)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Nip. 19731230 199403 1 003

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN. 1 Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%	10%	10%	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.2. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

1. Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan . Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase capaian pendapatan yang ditindaklanjuti tahun 2015-2016 :

Formulasi Indikator Sasaran : $\frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$
--

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah setiap tahun Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	%	10	10	100	100

Indikator persentase capaian pendapatan yang ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dengan meningkatkan Pendaparan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari tabel 3.3

menunjukkan bahwa realisasi kinerja capaian pendapatan yang ditindaklanjuti Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Indikator Kinerja ini didukung oleh kegiatan antara lain :

- a. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
- b. Penyusunan Laporan PAD
- c. Cetak masal dan pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2
- d. Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2
- e. Penunjang sistem e-PAD
- f. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah

SASARAN. 2

Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak dan retribusi melalui penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Optimalisasi penggalian potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	%	10%	10%	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.4 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

2. Persentase Optimalisasi penggalian potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi pada Tahun 2017 dengan target sebanyak 6 (enam) dokumen yang meliputi Dokumen Revisi RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA PPAS, Dokumen KUA PPAS Perubahan, Dokumen LKPJ dan Perjanjian Kinerja. Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase keselarasan RPJMD dengan dokumen lainnya, tahun 2015-2016 :

$$\text{Formulasi Indikator Sasaran} = \frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	%	10	10	10	10

Indikator persentase optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan dokumen lainnya merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa realisasi persentase optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan dokumen lainnya Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Dalam mencapai indikator kinerja persentase optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan dokumen lainnya didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Intesifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Pengadaan Barang Kuasi
3. Sosialisasi Pajak Daerah
4. Pemetaan potensi reklame

SASARAN. 3

Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait	%	10	10	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.6 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**.

3. Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait. Berikut tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait dengan dokumen lainnya, tahun 2015-2016 :

$$\text{Formulasi Indikator Sasaran} = \frac{\text{Persentase Realisasi}}{\text{Persentase Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.7 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait Tahun 2016-2017

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
			2016	2017	2016	2017
1.	Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait	%	10	10	10	10

Indikator persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.7 menunjukkan bahwa realisasi persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait Tahun 2016-2017 dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan, tercantum pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang Sasaran Strategis

NO.	SABARAN STRATEGIS	TAHUN 2017		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	75.622.500	68.127.750	90,09
2	Penyusunan Laporan PAD	92.592.060	88.487.300	95,57
3	Cetak masal dan pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2	378.980.000	371.241.400	97,96
4	Pendataan dan Verifikasi Nomor Objek Pajak PBB-P2	106.906.016	93.988.354	87,92
5	Penunjang sistem e-PAD	147.290.788	146.404.600	99,40
6	Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah	165.825.000	165.483.900	99,79
TOTAL		967.216.364	933.733.304	95,12

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017

Dari tabel 3.8 diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 sebesar Rp.3.832.309.304,- terealisasi sebesar Rp.3.630.141.019,- atau 94,72%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 5,28% atau secara absolut sebesar Rp.202.168.285,-
- Sisa anggaran sebesar Rp.202.168.285,- mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui dana APBD sebesar Rp. 3.832.309.304 dan terealisasi sebesar Rp. 3.593.422.839 atau 94.72% seperti rincian berikut :

Tabel 3.9 Capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2017		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Tenwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	967.216.364	933.733.304	95,12
2	Tenwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	92.592.060	88.487.300	95,57
3	Tenwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait	378.980.000	371.241.400	97,96
TOTAL		3.832.309.304	3.593.422.839	94,72

Capaian realisasi keuangan secara keseluruhan yang mencapai angka 94,72 %

3.3 Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

3.4 Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari 3 sasaran strategis dan menentukan persentase hasil pencapaiannya.

Sasaran 1 Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi
		10%	10 %

Pada tahun 2017 dari target indikator kinerja Badan Pendapatan mengenai Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang Selaras terealisasi sangat baik, hal ini dinilai dari pencapaian seluruh indikator kinerja yang nilainya 100%. Program dan kegiatan yang mendukung untuk tercapainya indikator tersebut yaitu:

Sasaran 2 Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalan potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah

Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalan potensi sumber-sumber pendapatan Asli Daerah	Persentase optimalisasi penggalan potensi dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Target	Realisasi
		10%	10%

Sasaran strategis Badan Pendapatan yang kedua adalah Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai sasaran strategis ini, maka ditetapkanlah 1 indikator yang harus dicapai yaitu: Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah

Sasaran 3

Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait

Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait	Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan instansi terkait	Dokumen	Realisasi
		100%	100%

Sasaran strategis Badan Pendapatan yang ke tiga adalah Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait

Untuk mencapai sasaran ini, pada tahun 2017 dilaksanakan 5 (lima) kegiatan dan terealisasi sebesar 100% dengan indikator kinerja yaitu :

- Monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah
- Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah
- Pemuthakiran data piutang PBB-P2

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2017, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 sebagai cerminan dari hasil kinerja Badan Pendapatan selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian.

Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, mencakup penilaian tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari eselon II, eselon III dan eselon IV. Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator semuanya tercapai sesuai yang diharapkan atau sesuai target. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pencapaian indikator kinerja selama tahun 2017, tidak ditemui kendala yang berarti, tetapi ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu :

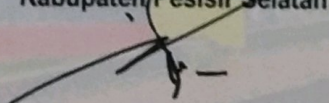
1. Data potensi retribusi daerah perlu ditingkatkan akurasi sesuai kondisi riil lapangan.
2. Masih perlunya pemberdayaan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah
3. Pengelolaan BUMD perlu ditingkatkan sehingga meningkatkan deviden untuk menambah kontribusi Pendapatan Asli Daerah
4. Perlu adanya penyempurnaan payung hukum pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan undang-undang yang ada
5. Penegakan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah masih perlu ditingkatkan

Upaya yang akan dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut yaitu :

1. Perlu dilaksanakan pemetaan potensi retribusi daerah secara komprehensif sesuai dengan kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada.
2. Dilaksanakan pendataan dan pemberdayaan aset yang ada, baik dilakukan secara , mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah
3. Perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta peraturan Bupati pendukung dalam pengelolaan pemungutan daerah sehingga sesuai dengan kondisi riil yang ada

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Badan Pendapatan pada tahun-tahun berikutnya.

Painan, Desember 2017
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan


DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003